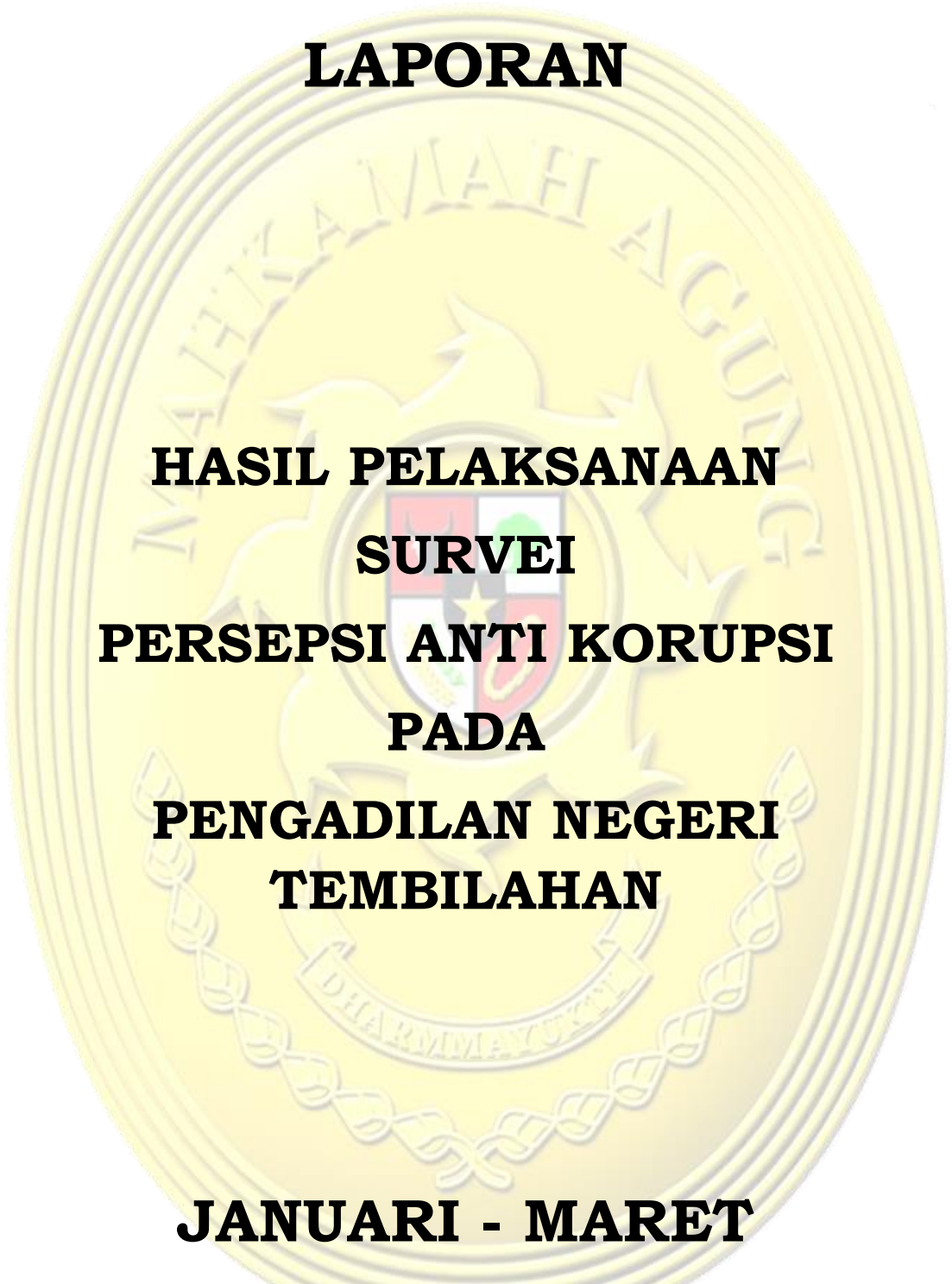




LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
TEMBILAHAN**

**JANUARI - MARET
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Rencana Kerja.....	4
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian	6
2.2. Populasi Dan Sampel.....	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	17
BAB IV PENUTUP	20
4.1. Kesimpulan.....	20
4.2. Rekomendasi	21

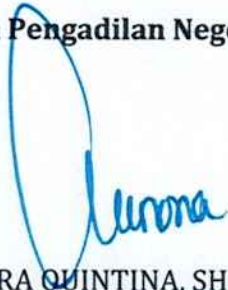
LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KELAS II

Berdasarkan
PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017

Disahkan di Tembilahan
Pada Hari Selasa, tanggal 2 April 2024

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan,



AURORA QUINTINA, SH, MH
NIP. 19790219 200112 2 002

Ketua Tim Survei,



IONTA GINTING, SH
NIP. 199511282017121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201.. serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Pertanyaan Survei.
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data :
 - a. Jumlah Responden; Jumlah Responden yaitu 90 responden, yang keseluruhannya mengisi survei secara online yang diminta secara acak kepada masyarakat/pengunjung yang menerima layanan di Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data; Lokasi survey dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri

Tembilahan.

- **Penyusunan Jadwal**

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilaksanakan secara online melalui Aplikasi Sisuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dari tanggal **1 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024**.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Tembilahan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mendampingi saat pengisian Kuesioner secara elektronik, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei SPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei SPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.2.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tembilahan mayoritas memiliki latar S1.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak / Belum Sekolah	0	0
2	SD	5	8,77
3	SMP	1	1,75
4	SMU	15	26,31
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	0/0/3/0	5,26
6	S1	29	50,87
7	S2	4	7,01
8	S3	0	0
Jumlah		57	100

3.2.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 57,89% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tembilahan memiliki pekerjaan sebagai Lainnya

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%,
1	PNS	8	14,03
2	TNI	1	1,75
3	POLRI	6	10,52
4	Swasta	7	12,28
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	2	3,50
7	Lainnya	33	57,89
Jumlah		57	100

3.2.3. Kelompok Usia Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden pada penelitian ini rata – rata berumur 29 – 39 Tahun.

Tabel 6
Usia Responden
Responden Menurut Karakteristik Usia

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 - 28 Th	20	35,09
2	29 - 39 Th	25	43,86
3	40 - 49 Th	8	14,04
4	50 - 59 Th	3	5,26
5	60 - 69 Th	1	1,75
Jumlah		57	100

3.2.4. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik mayoritas pada penelitian ini berjenis kelamin Laki-laki.

Tabel 7.
Jenis Kelamin

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	30	52,63
2	Perempuan	27	47,36
Jumlah		57	100

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi data.

Tabel 8.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Sesuai	1	0	0
2.	Jarang Sesuai	2	0	0
3.	Sering Sesuai	3	0	0
4.	Selalu Sesuai	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari penyalahgunaan jabatan.

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari menjual pengaruh.

Tabel 10.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada kesulitan dalam transparansi biaya.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada memungut biaya tambahan.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada menerima hadiah atas pelayanan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan telah melakukan transparansi pembayaran.

Tabel 14.
Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.
Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	57	100
Jumlah			57	100

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 17.
Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	57	100
Jumlah			57	100

3.3.0 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari melakukan transaksi rahasia.

Tabel 12.
Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	57	100
Jumlah			57	100

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan sebesar **100.00**

Indeks **100.00** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Survei Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tembilahan.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	petugas sangat baik dalam memberikan pelayan terhadap masyarakat, agar tersebut terus ditingkatkan
2	Baik
3	Untuk Pelayanan di PTSP sudah teratus dan Cepat terhadap pelayanannya
4	Sangat Memuaskan
5	tingkat kualitas pelayan yang sudanh sangat baik
6	sangat baik
7	Bagus
8	Pelayanan Sangat Jelas dan Baik
9	Pelayanan baik, ramah dan sopan
10	Selama di dalam ruangan pelayanan sangat puas, penjelasan yang diberikan sangat jelas dan mudah dimengerti
11	Pelayanan Sudah Sesuai SOP
12	Pelanyannya sangat baik dan ramah
13	TINGKATKAN KINERJA DAN PERTAHANKAN
14	SANGAT BAIK
15	Pelayanan Sangat Baik dan Memuaskan
16	Pelayanan Sangat Memuaskan
17	sangat memuaskan dan terus di tingkatkan
18	pelayanannya sangat membantu

19	Pelayanan Sangat Baik
20	PUAS DAN BAIK
21	Kualitas Pelayanan Sangat Baik, Saya berharap agar terus ditingkatkan
22	Pelayanan Sangat Baik,Tenang dan Ramah
23	sangat baik
24	Pelayanan PTSP Sangat Baik, semua hal sesuai prosedur tanpa ad pungutan yang tidak perlu dan sesuai aturan yang berlaku
25	Pelayanan SangatRamah dan Baik
26	Pelayanan sangat baik sekali
27	sangat baik
28	layanan yang diberikan sangat baik, pertahankan dan tingkatkan
29	layanan yang diberikan sangat baik, pertahankan dan tingkatkan
30	Pelayanan yang Ramah dan Solutif
31	Pelayanan Sangat Memuaskan,Cepat dan Sigap
32	Pelayanannya cepat dan ramah
33	Pelayanan yang diberikan sangat baik dan sangat mempermudah urusan dan petugas pelayanan juga sangat ramah
34	Pelayanan Sangat Memuaskan dan Cepat
35	Pelayanannya baik
36	Pelanyanannya Sangat Baik Terus tingkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik
37	Sangat Memuaskan
38	Sangat Baik dan Selalu memberikan pelayanan yang Bagus
39	Tetap Konsisten dalam Pelayanan Pelayanan mantap
40	Tetap Konsisten dalam Pelayanan Pelayanan mantap
41	Pelayanan sangat baik dan Profesional
42	sangat memuaskan
43	SANGAT BAGUS
44	Sangat Memuaskan ramah dan Baik
45	Pelayanan yang begitu ramah, cepat, dan sangat memuaskan
46	Pelayanan Ramah dan Baik
47	Sangat Memuaskan
48	Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tembilahan baik, semoga lebih baik kedepannya

49	Pelayanannya sangat bagus, ramah dan baik
50	Pelayanannya Sangat Baik
51	Pelayanan sangat Memuaskan dan Ramah
52	Pelayanan sangat Bagus dan Ramah
53	Pelayanan sangat Bagus dan Ramah
54	Pelayanan Ramah dan Mudah serta Memuaskan, Tingkatkan Terus Pelayanan yang ada
55	Sangat Memuaskan
56	Sangat Memuaskan
57	Pelayanan Sangat Baik, Sopan dan dapat Dipahami apa yang disampaikan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tembilahan diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Tembilahan memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,000 atau masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

Selanjutnya hasil Survey Presepsi Anti Korupsi tersebut telah menyimpulkan sudah ada 3 (tiga) indikator terendah yang meliputi indikator **Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan dan Menjual Pengaruh** dan 3 (tiga) indikator terendah tersebut telah dilakukan tindak lanjut pada tanggal 2 April 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Agar seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Negeri Tembilahan tidak menjalankan peraturan selain SOP yang berlaku.
- Agar seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Negeri Tembilahan memberikan keterbukaan informasi kepada Pencari Layanan

Pengadilan dan Pencari Keadilan.

- Agar seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Negeri Tembilahan tidak menghubungi Pencari Layanan Pengadilan atau Pencari Keadilan baik untuk membantu pengelolaan surat ataupun berkas perkara.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Tembilahan periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 4,00 atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan dan Menjual Pengaruh** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.